



Pemerintah
Kabupaten Probolinggo

Rencana Kerja (RENJA) BPKAD

TAHUN ANGGARAN

2027



(0335) 846651



bppkad@probolinggokab.go.id



Jalan Raya Panglima Sudirman No. 134 Kraksaan, Probolinggo

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas bimbingan dan karuniaNya sehingga RENJA Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2027 dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja (Renja) BPKAD Kabupaten Probolinggo Tahun 2027 mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, dengan mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis telah berjalan sesuai RENJA yang telah ditetapkan, disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program dan kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

RENJA BPKAD Tahun 2027 ini disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan merupakan dokumen perencanaan BPKAD Kabupaten Probolinggo untuk periode 1 (satu) tahun. RENJA ini adalah sebagai dokumen Perencanaan yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran BPKAD Tahun 2027 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan dan data tersebut untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan keuangan baik target dan realisasinya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen ini masih belum sempurna, sehingga perlu adanya kritik yang sifatnya konstruktif dan masukan guna penyempurnaan dimasa yang akan datang. Akhirnya semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak.

PROBOLINGGO, 05 Agustus 2026
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO



KRISTIANA RULIANI, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730215 199302 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL..... iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang.....1

1.2 Landasan Hukum2

1.3 Maksud dan Tujuan5

1.3.1 Maksud5

1.3.2 Tujuan5

1.4 Sistematika Penulisan5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPKAD TAHUN LALU 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPKAD Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPPKAD7

2.1.1 Analisis Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPPKAD Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 (Tabel T-C.29)7

Analisis Realisasi Program Prioritas Tahun 2025 (Program SAE) BPPKAD Kabupaten Probolinggo29

Kesimpulan ;30

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah31

Analisis Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPPKAD Kabupaten Probolinggo31

2.3 Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.35

- Dampak terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM).....36

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 202738

Narasi Analisis39

Kesimpulan40

2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Masyarakat52

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 55

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....55

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah56

3.3 Program dan Kegiatan57

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 70

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.....77

II. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.....77

III. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).....78

BAB V PENUTUP 84

DAFTAR TABEL

Tabel 1 - Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKAD dan 14

Tabel 2 - Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah – BPKAD
Kabupaten Probolinggo 33

Tabel 3 - TABEL T-C.31 Review Terhadap Renja RKPD Tahun 2027 Kabupaten
Probolinggo 42

Tabel 4 - TABEL T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2027 Kabupaten Probolinggo..... 54

Tabel 5 - Tabel 3.2.2 Tujuan, Sasaran Dan Indikator Serta Target Kinerja BPKAD Tahun
2025 s/ d 202944

Tabel 6 - TABEL T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028..... 62

Tabel 7 - TABEL Bab 4.1 Rencana Kerja Dan Pendanaan BPKAD Tahun 2027 62

Tabel 8 - TABEL Bab 4.2 Rencana Kerja Dan Pendanaan Program Prioritas 2027 75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun pada akhir tahun anggaran dengan memperhatikan target tujuan dan sasaran yang menjadi indikator kinerja utama BPKAD, dengan memperhatikan perubahan kondisi yang terjadi, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Termasuk evaluasi kinerja pelaksanaan Renja sebelumnya, perubahan prioritas pembangunan, serta perubahan kebijakan dan peraturan yang relevan. Kondisi internal (misalnya sumber daya manusia, anggaran) dan eksternal (misalnya ekonomi, sosial, lingkungan) dapat mengalami perubahan. Renja memungkinkan adaptasi terhadap perubahan tersebut, sehingga pembangunan daerah tetap berjalan sesuai dengan kondisi yang ada. Renja diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan daerah. Ini dapat dicapai melalui penyesuaian yang tepat pada program dan kegiatan, serta penggunaan anggaran yang lebih optimal.

Untuk itu perumusan program, dan kegiatan pada RENJA BPKAD Kabupaten Probolinggo Tahun 2027 akan menyelaraskan tujuan dan sasaran pada RENJA Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2027. Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan di tingkat perangkat daerah selaras dengan program pembangunan di tingkat pemerintah daerah.

1.1.1 Keterkaitan antara Renja BPKAD dengan RKPD

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan, penyusunan renja salah satunya berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu dalam Pasal 78 ayat 1 huruf (d) Permendagri No 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan Renja RKPD mencakup penelaahan Renja Perangkat Daerah. Ini artinya antara Renja dan RKPD merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Renja berpedoman kepada RKPD, sementara penyusunan Ranwal RKPD mencakup penelaahan terhadap Ranwal Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja BPKAD Kabupaten Probolinggo Tahun 2027 berpedoman kepada RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2027.

1.1.2 Keterkaitan antara Renja BPKAD dengan Renstra BPKAD

Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), dokumen Renja BPKAD juga berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) BPKAD TA 2025-2029. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 – 5 tahun yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan pula dengan tegas pula bahwa sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran Renja Perangkat Daerah, merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah. Ini artinya harus terdapat kesesuaian antara Dokumen Renstra dengan Dokumen Renja Perangkat Daerah khususnya dalam hal sasaran sebagai dasar dalam penilaian SAKIP Perangkat Daerah.

1.1.3 Keterkaitan antara Renja BPKAD dengan Renja Provinsi

Keterkaitan Renja BPKAD dengan Renja BPKAD Provinsi Jawa Timur lebih bersifat sinkronisasi dan harmonisasi dan sinergi sebagaimana diatur dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah, dalam hal ini terkait penyesuaian kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah. .

1.1.4 Renja dan Tindak Lanjut dalam RAPBD

Renja BPKAD Kabupaten Probolinggo Tahun 2027 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPKAD Kabupaten Probolinggo Tahun 2027. Sedangkan RKA BPKAD Tahun 2027 merupakan dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan sebagai dokumen APBD Kabupaten Probolinggo. Oleh karena itu Renja merupakan salah satu dokumen penting untuk kemudian ditindak lanjuti dalam APBD Kabupaten Probolinggo.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan RENJA Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo tahun 2005 – 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 18 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2027;
18. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2027;
19. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 35 Tahun 2023 Perubahan atas RENJA Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2024.
20. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 24 Tahun 2026 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja BPKAD Kabupaten Probolinggo Tahun 2027 dimaksudkan untuk :

- a. Dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang memuat program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD.
- b. Penjabaran lebih operasional dari Renstra BPKAD, agar visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis dapat diterjemahkan dalam RENJA yang terukur tiap tahunnya.
- c. Pedoman pelaksanaan pembangunan bidang keuangan daerah yang memuat target kinerja dan pagu indikatif, sehingga menjadi acuan bagi pelaksanaan APBD.
- d. Instrumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah, yang nantinya menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Renja BPKAD tahun Anggaran 2027 adalah sebagai berikut :

- a. Menjamin keterkaitan antara perencanaan tahunan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi (RPJMD/RPJPD Kabupaten, RKPD, dan Renstra).
- b. Menetapkan prioritas program dan kegiatan BPKAD yang mendukung peningkatan pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah secara transparan, akuntabel, dan efisien.
- c. Mengoptimalkan alokasi sumber daya (dana, aparatur, sarana prasarana) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- d. Menjadi pedoman kerja tahunan bagi seluruh bidang di BPKAD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- e. Sebagai dasar pengukuran kinerja melalui indikator yang jelas, sehingga dapat dievaluasi capaian target Renstra BPKAD.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2027 BPKAD Kabupaten Probolinggo disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan RENJA Pemerintah Daerah.

Sistematika penulisan dokumen rencana kerja sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan Renja BPKAD Kabupaten Probolinggo Tahun 2027 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik yang terdiri dari

- 1.1 latar belakang,
- 1.2 landasan hukum,
- 1.3 maksud dan tujuan,
- 1.4 dan sistematika penulisan.

BAB II : EVALUASI RENJA BPKAD TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPKAD Kabupaten Probolinggo tahun lalu 2027 sampai dengan Triwulan II (Juni 2027) analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Tujuan dan Sasaran RENJA dan pendanaan BPKAD Kabupaten Probolinggo Tahun 2024.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat rencana kerja berupa nama program, kegiatan, subkegiatan serta pagu anggaran yang dibutuhkan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BPKAD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPKAD Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPPKAD

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKAD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Keuangan BPKAD. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan RENJA yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Dari rata-rata indikator capaian kinerja tersebut, Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo telah mencapai target maksimal, sedangkan untuk pencapaian yang tidak maksimal atau tidak ada realisasi karena efisiensi dan efektifitas anggaran.

2.1.1 Analisis Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPPKAD Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 (Tabel T-C.29)

1. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPPKAD sampai dengan tahun berjalan, terdapat beberapa sub kegiatan yang belum mencapai target Renstra secara optimal. Di antaranya adalah:

1. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan tingkat capaian 0% terhadap target Renstra tahun berjalan. Subkegiatan ini tidak direalisasikan karena efektifitas dan efisiensi anggaran.
2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pengamanan Barang Milik Daerah yang hanya mencapai 24,6% dari target Renstra. Faktor tidak tercapainya realisasi kinerja pada subkegiatan ini karena target pengamanan aset berupa terbitnya sertifikat tanah atas aset tanah pemerintah kabupaten Probolinggo kebesaran.

2. Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Sebagian besar program, kegiatan, dan sub kegiatan BPKAD telah mencapai target yang ditetapkan. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah secara umum menunjukkan capaian kinerja sebesar 100% terhadap target tahunan maupun target Renstra tahun berjalan. Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran,

pelaporan keuangan, pengelolaan kas daerah, penatausahaan aset, inventarisasi aset, pelayanan pajak daerah, serta penagihan pajak daerah telah dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan.

3. Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Beberapa kegiatan menunjukkan capaian yang melebihi target yang ditetapkan.

Di antaranya adalah:

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mencapai 166% dari target tahunan, Ini terjadi karena target di renstra (awal) lebih kecil dari realisasi akhir tahun yg dihitung dari perubahan anggaran.
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang mencapai 500%, ini terjadi karena penyesuaian target kinerja pada saat perubahan anggaran.
3. Persentase Peningkatan Pajak Daerah Tahun Berjalan yang mencapai 107% terhadap target Renstra tahun berjalan. Capaian tersebut menunjukkan adanya efektivitas pelaksanaan program serta kemampuan perangkat daerah dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.

4. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya, atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

1. Keterbatasan alokasi anggaran pada beberapa kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilakukan secara optimal.
2. Perubahan prioritas kebijakan pemerintah daerah yang mengakibatkan penyesuaian target dan pelaksanaan kegiatan.
3. Adanya perubahan regulasi yang memerlukan penyesuaian mekanisme pelaksanaan kegiatan.
4. Belum lengkapnya data dan legalitas aset daerah yang menjadi objek pengamanan maupun penilaian aset.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

a. Implikasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program Renstra

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPPKAD menunjukkan bahwa secara umum capaian program dan kegiatan berada pada kategori baik dan mendukung pencapaian target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Namun demikian, masih terdapat beberapa kegiatan yang belum optimal sehingga menimbulkan implikasi tertentu terhadap pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.

1. Penguatan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah

Capaian sebagian besar program dan kegiatan yang telah memenuhi bahkan melebihi target memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran strategis BPPKAD, khususnya dalam peningkatan tata kelola pemerintahan, kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan aset, dan peningkatan pendapatan daerah. Kondisi ini memperkuat peluang tercapainya target Renstra pada akhir periode perencanaan.

2. Percepatan pencapaian indikator kinerja utama (IKU)

Program-program yang menunjukkan capaian tinggi, seperti pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah, dan pengelolaan barang milik daerah, berimplikasi pada percepatan pencapaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Renstra. Hal ini dapat meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan mendukung peningkatan penilaian SAKIP serta opini pengelolaan keuangan daerah.

3. Masih adanya potensi keterlambatan pada beberapa target Renstra

Kegiatan yang belum mencapai target, seperti pengamanan barang milik daerah dan penyediaan peralatan rumah tangga, berimplikasi pada belum optimalnya pencapaian indikator terkait pengelolaan aset daerah. Apabila kondisi ini tidak segera diperbaiki, maka dapat mempengaruhi capaian target Renstra pada aspek tertib administrasi aset dan kualitas pengelolaan barang milik daerah.

4. Kebutuhan penyesuaian strategi dan alokasi sumber daya

Perbedaan capaian antar kegiatan menunjukkan perlunya penyesuaian strategi pelaksanaan program, penguatan koordinasi, serta realokasi sumber daya pada kegiatan yang memiliki capaian rendah. Tanpa penyesuaian tersebut, terdapat risiko ketidakseimbangan kontribusi antar program terhadap sasaran Renstra.

5. Peningkatan tuntutan terhadap kualitas pengendalian kinerja

Capaian yang melebihi target pada beberapa kegiatan mengindikasikan adanya kebutuhan riil yang lebih besar dibandingkan target awal. Kondisi ini berimplikasi pada perlunya penyempurnaan proses perencanaan dan penetapan target agar lebih realistis, terukur, dan berbasis data kebutuhan aktual.

6. Dampak terhadap akuntabilitas dan pelayanan publik

Keberhasilan pelaksanaan mayoritas kegiatan mendukung peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan, aset, dan pendapatan daerah, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Sebaliknya, kegiatan yang belum optimal berpotensi menurunkan efektivitas pelayanan administrasi dan pengelolaan aset apabila tidak segera ditindaklanjuti.

Kesimpulan ;

Secara keseluruhan, capaian kinerja BPPKAD sampai dengan tahun berjalan telah memberikan implikasi positif terhadap pencapaian target program Renstra Perangkat Daerah. Namun, masih diperlukan penguatan pada beberapa kegiatan yang belum optimal agar seluruh target Renstra dapat tercapai secara konsisten, efektif, dan berkelanjutan hingga akhir periode perencanaan.

b. Implikasi terhadap Target Capaian Program Renstra

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPPKAD sampai dengan tahun berjalan menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Kondisi ini memberikan implikasi positif terhadap pencapaian target Renstra Perangkat Daerah, terutama pada aspek pengelolaan keuangan, pengelolaan pendapatan daerah, dan tata kelola birokrasi. Capaian yang tinggi pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah mendukung terwujudnya target peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta peningkatan pendapatan asli daerah secara berkelanjutan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa sub kegiatan yang belum optimal, seperti pengamanan Barang Milik Daerah dan penyediaan peralatan rumah tangga. Ketidaktercapaian tersebut berimplikasi pada belum optimalnya pencapaian sasaran strategis pengelolaan aset daerah dalam Renstra. Jika kondisi ini tidak segera ditindaklanjuti, maka target peningkatan tertib administrasi, pengamanan, dan pemanfaatan aset daerah berpotensi tidak tercapai secara maksimal pada akhir periode Renstra.

Secara lebih rinci, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Mendorong percepatan pencapaian target Renstra pada bidang keuangan dan pendapatan daerah.

Keberhasilan capaian indikator seperti ketepatan waktu penyusunan APBD, persentase penyerapan APBD, dan peningkatan pajak daerah memperkuat posisi BPPKAD dalam mencapai sasaran Renstra terkait akuntabilitas dan kemandirian keuangan daerah.

2. Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah.

Capaian indikator Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah yang melampaui target tahunan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi.

3. Menunjukkan adanya risiko keterlambatan pencapaian sasaran pengelolaan aset daerah.

Rendahnya capaian pada kegiatan pengamanan Barang Milik Daerah dapat menghambat terwujudnya target tertib pengelolaan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Memerlukan penyesuaian strategi dan prioritas pada tahun berikutnya.

Kegiatan yang belum mencapai target mengindikasikan perlunya penguatan perencanaan, koordinasi, pengawasan, dan alokasi sumber daya agar target Renstra dapat dicapai secara konsisten.

5. Memberikan dasar evaluasi untuk penyusunan Renja dan penganggaran tahun selanjutnya.

Hasil capaian kinerja menjadi bahan penting dalam menetapkan target yang lebih realistis, fokus program prioritas, serta langkah perbaikan berkelanjutan dalam periode Renstra berikutnya.

Secara keseluruhan, capaian kinerja BPPKAD sampai dengan tahun berjalan masih berada pada jalur yang mendukung pencapaian target Renstra Perangkat Daerah, meskipun diperlukan perhatian khusus pada beberapa sub kegiatan yang capaian kinerjanya belum optimal agar tidak mengurangi pencapaian sasaran strategis pada akhir periode Renstra.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Kebijakan dan tindakan perencanaan serta penganggaran yang akan ditempuh diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan berbasis kinerja, penguatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, optimalisasi pengelolaan aset dan pendapatan daerah, peningkatan kapasitas SDM, penguatan monitoring dan evaluasi, serta pemanfaatan teknologi informasi. Langkah tersebut diharapkan mampu mengatasi berbagai kendala pelaksanaan program dan kegiatan sehingga pencapaian target Renstra BPPKAD dapat terlaksana secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Untuk mengatasi berbagai faktor yang menyebabkan belum optimalnya capaian beberapa program dan kegiatan, BPKAD perlu mengambil kebijakan dan langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Penguatan Kualitas Perencanaan Program dan Kegiatan

Melakukan penyusunan perencanaan berbasis kinerja dengan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, kebutuhan riil organisasi, prioritas pembangunan daerah, serta kemampuan pendanaan daerah sehingga target yang ditetapkan lebih realistis dan terukur.

2. Peningkatan Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran

Meningkatkan konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran melalui penguatan proses verifikasi RKPD, Renja, KUA-PPAS, APBD, dan DPA agar seluruh program dan kegiatan memperoleh dukungan anggaran yang memadai.

3. Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Mengalokasikan anggaran secara lebih terarah untuk kegiatan inventarisasi, pengamanan, penilaian, sertifikasi, dan pemanfaatan aset daerah guna meningkatkan Indeks Pengelolaan Aset Daerah dan mengurangi risiko aset bermasalah.

4. Peningkatan Kapasitas SDM

Melaksanakan pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan secara berkelanjutan kepada pengelola keuangan, aset, dan pendapatan daerah guna meningkatkan kompetensi pelaksana program dan kegiatan.

5. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian fisik dan keuangan setiap triwulan untuk mengidentifikasi hambatan pelaksanaan kegiatan lebih dini dan melakukan langkah percepatan apabila terjadi deviasi.

6. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem informasi pengelolaan keuangan, aset, dan pendapatan daerah guna meningkatkan akurasi data, mempercepat proses pelayanan, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

7. Penguatan Koordinasi dan Sinergi Antar Perangkat Daerah

Meningkatkan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah dalam penyediaan data, pelaksanaan rekonsiliasi, pengelolaan aset, dan optimalisasi pendapatan daerah sehingga target kinerja dapat dicapai secara lebih efektif.

8. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah melalui pemutakhiran basis data objek pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, digitalisasi pelayanan perpajakan daerah, serta pengawasan dan penagihan yang lebih efektif.

9. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Belanja Daerah

Mengutamakan alokasi anggaran pada program dan kegiatan yang memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis BPKAD dan target RPJMD sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih optimal.

10. Penguatan Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal

Meningkatkan penerapan manajemen risiko dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam seluruh proses bisnis BPKAD untuk meminimalkan potensi hambatan yang dapat mempengaruhi pencapaian

TABEL T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPPKAD
dan Pencapaian Renstra BPPKAD s/d Tahun 2026 (tahun berjalan)
Kabupaten Probolinggo

BPKAD

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan S/D Tahun (N-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun Lalu Tahun (N-2)			Target Program Dan Kegiatan (Renja BPKAD Tahun N-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BPKAD S/D Tahun Berjalan	
					Target Renja BPKAD Tahun (N-2)	Realisasi Renja BPKAD Tahun (N-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan (Tahun N-1)	Tingkat Capaian Ralisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10 = (5+7+9)	11=10/9*100
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH										
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	80,00	80.65	81.86	82.61	0.75 %	83.08	95.72	115 %
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Tersusun dan Berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	8 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	12 lapsoran	12 laporan	12 laporan	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 org/bln	79 org/bln	77 org	71 org	93.4%	900 Orang	900 Orang	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKP	5 laporan	0 laporan	0	0	0%	12 Laporan	12 Laporan	100 %
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	93 Paket	0 Paket	127 paket	112 paket	88 %	100 Paket	100 Paket	100 %
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 org	26 org	14 org	14 org	100 %	14 Orang	14 Orang	100 %
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksana	100 %	83 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18 paket	0 paket	17 paket	17 paket	100 %	5 Paket	5 Paket	100 %
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 paket	7 paket	17 paket	17 paket	100 %	17 Paket	17 Paket	100 %
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14 paket	3 paket	13 paket	13 paket	100 %	13 paket	0 paket	0 %
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 paket	3 paket	10 paket	10 paket	100 %	12 Paket	12 Paket	100 %
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 paket	3 paket	8 paket	8 paket	100 %	25 Paket	25 Paket	100 %
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 laporan	14 laporan	14 l aporan	14 laporan	100 %	14 Laporan	14 Laporan	100 %
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	117 laporan	90 laporan	114 laporan	113 laporan	99 %	114 Laporan	114 Laporan	100 %

	SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	0	0	0%	555 Dokumen	555 Dokumen	100 %
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	100 %	100 %	100 %	90.72 %	90.72 %	100 %	100 %	100 %
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 unit	6 unit	3 unit	5 unit	166 %	1 Unit	1 Unit	100 %
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 unit	0	6 unit	6 unit	100 %	0 Unit	0 Unit	0 %
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	47 buah	12 unit	2 unit	10 unit	500 %	47 Unit	47 Unit	100 %
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	0 unit	1 unit	1 unit	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	94.00%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	8 laporan	8 laporan	100 %	12 Laaporan	12 Laaporan	100 %
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 laporan	12 laporan	8 Laporan	8 Laporan	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpelihara	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	32 unit	20 unit	31 unit	31 unit	100%	31 Unit	31 Unit	100 %
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	10 unit	8 unit	8 unit	100 %	8 Unit	8 Unit	100 %
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	18 unit	14 unit	14 unit	100 %	14 Unit	14 Unit	100 %
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	0 unit	1 unit	1 unit	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %

	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	87%	100 %	96 %	96 %	100 %	100 %	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan P-APBD (tepat waktu)	100%	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 dokumen	2 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100 %	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5 Dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100 %	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %

	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Realisasi Penyerapan APBD	94.02%	91.26 %	94.1 %	98,99 %	98,99 %	94.2%	97.40 %	103 %
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	220 dokumen	220 dokumen	220 dokumen	220 dokumen	100 %	220 Dokumen	220 Dokumen	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %

	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 dokumen	120 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	162 org	162 org	162 org	162 org	100 %	162 Orang	162 Orang	100 %
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase SKPD yang Melaksanakan Rekonsiliasi Akun di LKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	87 dokumen	87 dokumen	87 dokumen	87 dokumen	100 %	87 Dokumen	87 Dokumen	100 %

	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	100 %	6 Laporan	6 Laporan	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10 dokumen	8 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	100 %	10 Dokumen	10 Dokumen	100 %
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyaluran Dana Bantuan Keuangan, Dana Tidak Terduga, Dana Bagi Hasil dan Pembayaran Cicilan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	70 laporan	325 laporan	325 laporan	325 laporan	100 %	325 Laporan	325 Laporan	100 %
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3 laporan	12 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12 laporan	12 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indek Pengelolaan Aset Daerah (IPA)	86 %	86%	80%	80%	100 %	84%	84%	100 %
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase SKPD yang tertib pengelolaan BMD yang sesuai peraturan perundang-undangan dan tepat waktu	86 %	80 %	80 %	80 %	100 %	84%	84%	100 %
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	87 dokumen	87 dokumen	87 dokumen	87 dokumen	100 %	87 dokumen	87 dokumen	100 %
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	87 laporan	87 laporan	87 laporan	87 laporan	100 %	261 Laporan	261 Laporan	100 %

	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	87 laporan	87 laporan	87 laporan	87 laporan	100 %	87 Laporan	87 Laporan	100%
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	5 laporan	5 laporan	55 laporan	55 laporan	100 %	500 Laporan	123 Laporan	24.6 %
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	5 laporan	5 laporan	4 laporan	4 laporan	100 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	1 dokumen	100 %	6 dokumen	6 dokumen	100 %
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah Tahun Berjalan	1.3 %	5 %	1 %	1.16 %	1.16 %	1.4%	1.51 %	107 %
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah Tahun Berjalan	1.3 %	5 %	1 %	1.16 %	1.16 %	1.4%	1.51 %	107 %
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	4 unit	4 unit	12 unit	12 unit	100 %	15 Unit	15 Unit	100 %

	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	50 laporan	50 laporan	503 laporan	503 laporan	100 %	503 Laporan	503 Laporan	100 %
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	50 objek pajak	50 objek pajak	52 obyek pajak	52 obyek pajak	100 %	52 Objek Pajak	52 Objek Pajak	100 %
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	616 dokumen	616 dokumen	5002 dokumen	5002 dokumen	100 %	5000 dokumen	5000 dokumen	100 %
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	24 layanan	24 layanan	12 layanan	12 layanan	100 %	12 Layanan	12 Layanan	100 %
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	11 dokumen	11 dokumen	5002 dokumen	5002 dokumen	100 %	5000 dokumen	5000 dokumen	100 %
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	100 dokumen	100 dokumen	102 dokumen	102 dokumen	100 %	102 dokumen	102 dokumen	100 %
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	24 laporan	24 laporan	47 dokumen	17 dokumen	100 %	47 dokumen	47 dokumen	100 %

7. Realisasi Program Prioritas tahun 2025 (Program SAE)-

TABEL 2.7.1
Realisasi Program Prioritas tahun 2025 (Program SAE)

PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN PROBOLINGGO	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		
			Kinerja (K)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (K)	Satuan	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)
PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	KEUANGAN							
SAE-GUS-TUR 1. INSENTIF TAMBAHAN 100 JUTATiap DESA UNTUK INFRASTRUKTUR JALAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	100	%	515,999,751,000.00	100	%	501,972,024,334.00
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	325	laporan	486,069,096,000.00	325	laporan	473,416,628,000.00
SAE – PENDAPATAN 1. HOLDING (PERUSAHAAN INDUK) BUMD TEMBAKAU, AGRO, PERIKANAN DAN SEKTOR UNGGULAN LAINNYA	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indek Pengelolaan Aset Daerah (IPA)	84	%	2,744,573,475	84	%	2,622,847,226
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase SKPD yang tertib pengelolaan BMD yang sesuai peraturan perundangundangan dan tepat waktu	84	%	2,744,573,475	84	%	2,622,847,226
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1	dokumen	123,101,000	1	dok	121,454,493
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	87	dokumen	22,615,000	87	dok	20,423,500
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	261	Laporan	562,768,125	261	laporan	552,764,040

	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	87	lap	80,606,000	87	Laporan	74,381,000
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	500	laporan	1,139,984,350	123	laporan	1,072,686,423
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	4	Laporan	660,952,500	4	Laporan	651,743,110
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	6	Dokumen	154,546,500	6	dokumen	129,394,660
SAE. PENDAPATAN DAERAH								
1. INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAD	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.4	%	2,902,533,500	1.51	%	2,696,163,911
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Tahun Berjalan	1.4	%	2,902,533,500	1.51	%	2,696,163,991
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	15	unit	550,872,000	15	Unit	511,263,440
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	503	lap	253,359,700	503	Laporan	245,216,123
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	52	obyek pajak	422,682,400	52	Obyek pajak	338,723,490
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	5000	dokumen	201,691,400	5000	dok	185,016,160
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12	layanan	422,389,000	12	layanan	397,269,705
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	5000	dokumen	62,800,000	5000	dokumen	58,987,200

	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	102	dok	810,010,000	102	dokumen	784,079,163
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	47	laporan	178,729,000	47	laporan	175,608,630

Analisis Realisasi Program Prioritas Tahun 2025 (Program SAE) BPPKAD Kabupaten Probolinggo

Berdasarkan Tabel 2.7.1 Realisasi Program Prioritas Tahun 2025, secara umum pelaksanaan program prioritas BPPKAD yang mendukung Program SAE Kabupaten Probolinggo menunjukkan kinerja yang baik. Hal tersebut terlihat dari capaian indikator kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang sebagian besar mencapai target yang telah ditetapkan, dengan tingkat realisasi anggaran yang relatif tinggi dan efisien.

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah (SAE-GUS-TUR)

Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang mendukung kebijakan Insentif Tambahan Rp100 Juta per Desa untuk Infrastruktur Jalan menunjukkan capaian kinerja sebesar 100%, dimana indikator *Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah* berhasil mencapai target 100%. Dari alokasi anggaran sebesar Rp515,99 miliar, terealisasi sebesar Rp501,97 miliar atau sekitar 97,28%.

Pada kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, target penyusunan 325 laporan berhasil direalisasikan seluruhnya sebanyak 325 laporan (100%) dengan realisasi anggaran sebesar Rp473,42 miliar dari pagu Rp486,07 miliar atau mencapai 97,40%. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan desa berjalan efektif serta mendukung percepatan pembangunan infrastruktur jalan desa.

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (SAE-Pendapatan)

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mendukung pengembangan holding BUMD sektor unggulan menunjukkan capaian yang baik. Indikator Indeks Pengelolaan Aset Daerah (IPA) mencapai target sebesar 84%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp2,62 miliar dari pagu Rp2,74 miliar atau 95,56%.

Sebagian besar subkegiatan mencapai target 100%, antara lain:

- Penyusunan Standar Harga (1 dokumen);
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD (87 dokumen);
- Penatausahaan BMD (261 laporan);
- Inventarisasi BMD (87 laporan);
- Penilaian BMD (4 laporan);
- Optimalisasi Pemanfaatan dan Penghapusan BMD (6 dokumen).

Namun demikian, terdapat satu subkegiatan yang belum mencapai target yaitu Pengamanan Barang Milik Daerah. Dari target 500 laporan, hanya terealisasi 123 laporan atau sekitar 24,6%. Meskipun demikian realisasi anggaran mencapai 94,10%, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap ketepatan penetapan target output maupun metode pelaporan kegiatan pengamanan aset daerah.

3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (SAE-Pendapatan Daerah)

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang mendukung kebijakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD menunjukkan kinerja yang sangat baik. Indikator Persentase

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar 1,40%, namun berhasil direalisasikan sebesar 1,51% atau mencapai 107,86% dari target.

Realisasi anggaran program mencapai Rp2,70 miliar dari pagu Rp2,90 miliar atau sebesar 92,89%.

Seluruh subkegiatan pendukung berhasil mencapai target kinerja 100%, meliputi:

- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
- Pengolahan dan Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah;
- Penilaian PBB-P2 dan BPHTB;
- Penetapan Wajib Pajak Daerah;
- Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
- Penelitian dan Verifikasi Data Pajak;
- Penagihan Pajak Daerah;
- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa strategi intensifikasi dan ekstensifikasi PAD yang dilaksanakan telah mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah serta memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Kesimpulan ;

Secara keseluruhan, pelaksanaan Program SAE pada BPKAD Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Mayoritas indikator program, kegiatan, dan subkegiatan berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan tingkat realisasi anggaran yang tinggi dan efisien. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah berhasil mencapai bahkan melampaui target kinerja yang ditetapkan. Sementara itu, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah juga menunjukkan kinerja yang baik meskipun masih terdapat subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah yang perlu mendapat perhatian dan evaluasi lebih lanjut guna meningkatkan efektivitas pengamanan aset daerah pada tahun berikutnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kontribusi BPKAD terhadap pencapaian Program SAE Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 telah berjalan optimal dan mendukung terwujudnya tata kelola keuangan serta aset daerah yang akuntabel, efektif, dan berkelanjutan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPPKAD Kabupaten Probolinggo

Berdasarkan Tabel T-C.30, capaian kinerja pelayanan BPPKAD Kabupaten Probolinggo menunjukkan bahwa sebagian besar indikator pelayanan telah mencapai target Renstra yang ditetapkan. Kinerja tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan fungsi pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan aset daerah, dan pengelolaan pendapatan daerah telah berjalan secara efektif serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berkelanjutan.

1. Analisis Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pada kelompok Indikator Kinerja Utama, capaian tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran berhasil mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran telah selaras dan konsisten. Persentase Pengalokasian Anggaran dalam APBD juga mencapai target sebesar 80%, mencerminkan pemenuhan alokasi anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah mencapai 100%, menunjukkan keterbukaan informasi pengelolaan keuangan daerah kepada publik telah berjalan optimal. Persentase Penyerapan Anggaran mencapai 93%, sesuai target yang ditetapkan, sehingga menunjukkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Dari aspek kesehatan fiskal daerah, indikator Fleksibilitas Keuangan sebesar 2,07%, Solvabilitas Operasional sebesar 82,1%, Solvabilitas Jangka Panjang sebesar 51,63%, Solvabilitas Layanan sebesar Rp2.330.768,19 per penduduk, dan Solvabilitas Jangka Pendek sebesar 100% menunjukkan kondisi keuangan daerah yang relatif sehat dan mampu mendukung penyelenggaraan pelayanan publik secara berkelanjutan.

Selain itu, indikator Persentase Penilaian Opini BPK sebesar 100% menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam mempertahankan opini terbaik atas laporan keuangan daerah. Sementara itu, tingkat Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 18,35% mengindikasikan bahwa kemampuan pembiayaan daerah dari PAD masih perlu terus ditingkatkan guna mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer.

2. Analisis Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Pada kelompok Indikator Kinerja Kunci, beberapa indikator menunjukkan capaian yang baik. Opini Laporan Keuangan memperoleh nilai 100%, yang menegaskan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Indikator Revenue Mobilization atau deviasi realisasi PAD terhadap target PAD mencapai 103,76%, menunjukkan bahwa realisasi PAD mampu melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan keberhasilan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

Indikator Manajemen Aset mencapai nilai 4 sesuai target, yang menunjukkan bahwa tata kelola aset daerah telah berjalan dengan baik. Sementara itu, indikator Budget Execution menunjukkan realisasi belanja yang relatif terkendali dan mendukung efektivitas pelaksanaan APBD.

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian, terutama Akses Publik terhadap Informasi Keuangan Daerah yang baru mencapai 66,67% dibanding target 75%. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas publikasi dan keterbukaan informasi keuangan daerah melalui berbagai media informasi yang mudah diakses masyarakat.

Indikator Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah juga masih relatif rendah yaitu sebesar 3,76% dibanding target 19,16%. Hal ini menunjukkan bahwa struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi sehingga upaya peningkatan kemandirian fiskal perlu terus diperkuat.

3. Faktor Pendukung

Keberhasilan pencapaian indikator pelayanan didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

- Konsistensi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.
- Komitmen pimpinan daerah dalam penguatan tata kelola keuangan.
- Pemanfaatan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- Koordinasi yang baik antar perangkat daerah.
- Peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan, pendapatan dan aset daerah.

4. Faktor Penghambat

Adapun beberapa faktor yang masih menjadi kendala antara lain:

- Ketergantungan pendapatan daerah terhadap dana transfer.
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk keterbukaan data keuangan.
- Masih adanya potensi PAD yang belum tergali secara maksimal.
- Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah yang produktif.
- Keterbatasan data pendukung dalam pengembangan basis pajak dan retribusi daerah.

5. Kesimpulan

Secara umum, capaian kinerja pelayanan BPPKAD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik dan sebagian besar indikator telah mencapai target Renstra. Keberhasilan tersebut mencerminkan semakin meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan pendapatan daerah yang akuntabel, transparan, dan efektif. Ke depan, fokus perbaikan perlu diarahkan pada peningkatan kemandirian fiskal daerah, optimalisasi pengelolaan aset daerah, serta penguatan akses publik terhadap informasi keuangan guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin baik.

Tabel T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH – BPPKAD
KABUPATE PROBOLINGGO

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
				Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Indikator Kinerja Utama											
1	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (%)	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Prosentase Pengalokasian Anggaran dalam APBD (%)	-	-	80	80	80	80	80	80	80	80	
3	Prosentase Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (%)	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Prosentase Penyerapan Anggaran (%)	-	-	93	93	93	93	93	93	93	93	
5	Fleksibilitas Keuangan (%)	-	-	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07	
6	Solvabilitas Operasional (%)	-	-	82.1	82.1	82.1	82.1	82.1	82.1	82.1	82.1	
7	Persentase Penilaian Opini BPK (%)	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	
8	Solvabilitas Jangka Panjang (%)	-	-	51.63	51.63	51.63	51.63	51.63	51.63	51.63	51.63	
9	Solvabilitas Layanan (Rp/org)	-	-	2330768.19	2330768.19	2330768.19	2330768.19	2330768.19	2330768.19	2330768.19	2330768.19	
10	Solvabilitas Jangka Pendek (%)	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	
11	Prosentase Kemandirian Keuangan Daerah (%)	-	-	18.35	18.35	18.35	18.35	18.35	18.35	18.35	18.35	

	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	-	-									
1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	-	-	-	95	96	97	5.849	NA	97	5	
2	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	-	-	6.25	6	5	4	7.318	NA	4	7	
3	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	-	-	93	94	96	97	85.16	NA	97	86	
4	Manajemen Aset	-	-	4	4	4	4	4	NA	4	4	
5	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	-	-	73	70	75	80	66,667	NA	80	67	
6	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	-	-	15	16.31	19.16	18.35	3.757	NA	18.35	3	
7	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	-	-	19.11	19.13	19.16	19.17	9.813	NA	19.17	19	
8	Rasio Belanja Urusan pemerintahan Umum (Dikurangi transfer expenditures)	-	-	80.5	80.35	79.75	78.5	27.79	NA	78.5	79	
9	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	-	-	103	104	105	106	103.76	NA	106	100	
10	Opini Laporan Keuangan	-	-	100	100	100	100	100	NA	100	100	

2.3 Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1. Tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah.

Berikut hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan pengelolaan pendapatan keuangan dan aset daerah pada BPPKAD Kabupaten Probolinggo;

- Penguatan integrasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan berbasis kinerja.
- Peningkatan kualitas pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan APBD.
- Optimalisasi manajemen kas daerah dan percepatan penyerapan anggaran yang berkualitas.
- Optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk meningkatkan nilai ekonomi aset dan mendukung Pendapatan Asli Daerah.
- Percepatan penataan administrasi, inventarisasi, dan legalisasi Barang Milik Daerah berbasis digital.
- Penguatan tata kelola dan pengawasan Barang Milik Daerah yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi untuk meningkatkan Indeks Pengelolaan Aset (IPA).

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

- Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah: Kurangnya transparansi dan aksesibilitas masyarakat terhadap dokumen anggaran yang menyebabkan rendahnya akuntabilitas dan kepercayaan publik, serta ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan yang belum optimal.
- Manajemen Pengelolaan Aset Daerah yang belum Optimal: Banyak aset daerah yang tidak dimanfaatkan secara optimal, pencatatannya kurang rapi, bahkan ada yang terbengkalai, sehingga menghambat potensi pendapatan dan pembangunan.
- Pemanfaatan PAD yang Belum Optimal:
- Penyesuaian Transfer Kedaerah
- Inflasi
- Perubahan SOTK
- Sering terjadinya perubahan regulasi tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
- Belum optimalnya peningkatan pendapatan pajak daerah sehingga masih banyak potensi yang perlu digali;
- Kurang tertib administrasi SKPD dalam proses pembaruan data.

.2.3.3 Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);

- Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah;

Apabila permasalahan pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah tidak segera ditangani, maka akan berdampak langsung terhadap pencapaian visi dan misi Bupati Probolinggo, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), peningkatan kualitas pelayanan publik, dan kemandirian fiskal daerah. Keterbatasan PAD, belum optimalnya pengelolaan aset daerah, serta belum kuatnya integrasi perencanaan dan penganggaran dapat mengurangi kapasitas APBD dalam membiayai program prioritas pembangunan serta menurunkan efektivitas pencapaian target pembangunan daerah.
- Dampak terhadap Program Prioritas Nasional;
 - Permasalahan tersebut dapat menghambat dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program prioritas nasional, antara lain:
 - Penguatan reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
 - Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.
 - Penguatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - Digitalisasi pemerintahan dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
 - Peningkatan efisiensi belanja pemerintah daerah.
- Dampak terhadap NSPK;
 - Permasalahan tersebut berpotensi menyebabkan belum optimalnya pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang:
 - Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - Pengelolaan Pendapatan Daerah.
 - Penyusunan APBD dan pelaporan keuangan.
 - Penatausahaan serta pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Akibatnya, kualitas tata kelola pemerintahan dapat menurun dan berpotensi memengaruhi hasil pembinaan maupun pengawasan pemerintah pusat.
- Dampak terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Walaupun BPPKAD bukan penyelenggara urusan yang memiliki SPM secara langsung, kualitas pengelolaan keuangan daerah sangat menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi pendanaan SPM pada sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum,

serta sosial. Pengelolaan keuangan yang kurang optimal berpotensi mengurangi dukungan anggaran terhadap pencapaian target-target SPM tersebut.

- Dampak terhadap Sustainable Development Goals (SDGs); Permasalahan tersebut berpengaruh terhadap pencapaian beberapa tujuan SDGs, antara lain;
 - Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) melalui penguatan kapasitas fiskal dan iklim investasi.
 - Tujuan 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) melalui penyediaan pembiayaan pembangunan daerah.
 - Tujuan 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan) melalui optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
 - Tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh) melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
 - Tujuan 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) melalui penguatan kolaborasi pemerintah daerah dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah.

2.3.4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;

• Tantangan dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah

- Meningkatkan konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan.
- Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan APBD.
- Menyesuaikan pengelolaan keuangan dengan dinamika regulasi nasional.
- Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM pengelola keuangan.
- Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- Memperkuat implementasi digitalisasi pengelolaan keuangan daerah.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- Menyelesaikan legalisasi dan sertifikasi aset daerah.
- Meningkatkan tertib administrasi dan inventarisasi Barang Milik Daerah.
- Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah agar memberikan nilai ekonomi.
- Mengurangi aset yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- Memperkuat pengamanan administrasi, fisik, dan hukum aset daerah.

Bidang Tata Kelola Organisasi;

- Peningkatan nilai SAKIP dan Reformasi Birokrasi.
- Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital.
- Penguatan manajemen risiko dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

- Penguatan budaya kerja yang berorientasi pada hasil.
- Peningkatan kualitas data sebagai dasar pengambilan keputusan.
- **Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah**
 1. Dukungan Kebijakan Nasional
 - Reformasi birokrasi.
 - Transformasi digital pemerintahan.
 - Penguatan tata kelola keuangan daerah.
 - Penerapan SPBE dan Satu Data Indonesia.
 2. Perkembangan Teknologi Informasi
 - Digitalisasi pelayanan pajak daerah.
 - Pengembangan e-BMD.
 - Integrasi SIPD dan aplikasi pendukung.
 - Pemanfaatan dashboard kinerja dan analitik data.
 3. Potensi Peningkatan PAD
 - Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.
 - Optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
 - Pengembangan kerja sama pemanfaatan aset.
 - Pemutakhiran basis data perpajakan.
 4. Dukungan Regulasi
 - Penyempurnaan regulasi pengelolaan keuangan.
 - Penyempurnaan regulasi pengelolaan aset.
 - Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah.
 5. Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan
 - Sinergi dengan perangkat daerah.
 - Kerja sama dengan pemerintah desa.
 - Kolaborasi dengan instansi vertikal.
 - Kemitraan dengan perbankan dan dunia usaha.
 6. Peningkatan Kapasitas SDM
 - Pendidikan dan pelatihan.
 - Sertifikasi pengelola keuangan dan aset.
 - Penguatan kompetensi digital ASN.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027

Kurangnya intensitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta belum maksimalnya pendataan pendapatan lain yang sah, menyebabkan PAD belum berkontribusi secara signifikan terhadap kemandirian daerah.

2.4.1. Analisis Perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan.

Perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan dilakukan untuk memastikan bahwa program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, serta pagu anggaran yang direncanakan telah sesuai dengan

kebutuhan riil pembangunan daerah, kemampuan keuangan daerah, serta prioritas pembangunan yang berkembang. Hasil perbandingan ini menjadi dasar penyempurnaan rancangan RKPD sebelum ditetapkan menjadi dokumen perencanaan tahunan daerah.

Aspek	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan	Keterangan
Prioritas Program	Disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD dan Renstra	Terdapat kebutuhan tambahan pada beberapa sektor prioritas	Memerlukan penyesuaian prioritas dan fokus kegiatan
Indikator Kinerja	Mengacu pada target tahunan RPJMD	Sebagian indikator perlu disesuaikan dengan kondisi aktual	Perlu penyempurnaan target kinerja
Target Kinerja	Ditetapkan berdasarkan proyeksi awal	Beberapa target perlu ditingkatkan atau disesuaikan	Menyesuaikan kapasitas pelaksanaan dan kebutuhan daerah
Kegiatan/Subkegiatan	Mengacu pada usulan awal perangkat daerah	Terdapat kebutuhan kegiatan baru dan rasionalisasi kegiatan yang kurang prioritas	Dilakukan penyesuaian program dan kegiatan bidang pendapatan
Pagu Anggaran	Berdasarkan pagu indikatif awal	Terdapat perubahan kebutuhan pendanaan dan kemampuan fiskal daerah	Dilakukan penyesuaian pagu anggaran
Sasaran Penerima Manfaat	Berdasarkan data awal perencanaan	Ditemukan perubahan jumlah dan karakteristik penerima manfaat	Perlu pemutakhiran data sasaran

Narasi Analisis

Hasil analisis kebutuhan menunjukkan bahwa secara umum substansi Rancangan Awal RKPD telah sejalan dengan arah pembangunan daerah dan sasaran RPJMD. Namun demikian, terdapat beberapa penyesuaian yang diperlukan terutama pada prioritas program, target kinerja, kebutuhan pendanaan, serta kegiatan yang mendukung pencapaian indikator pembangunan daerah. Penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, perkembangan kondisi daerah, usulan pemangku kepentingan, serta kemampuan keuangan daerah.

Dari sisi penganggaran, hasil analisis kebutuhan mengindikasikan perlunya rasionalisasi terhadap kegiatan yang memiliki kontribusi rendah terhadap pencapaian sasaran pembangunan, sekaligus memperkuat alokasi pada program yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik dan pencapaian indikator kinerja daerah. Oleh karena itu, penyempurnaan Rancangan Awal RKPD diarahkan untuk meningkatkan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan target kinerja sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat berlangsung lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil perbandingan, Rancangan Awal RKPD pada prinsipnya telah sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah, namun masih memerlukan penyempurnaan pada aspek prioritas program, target kinerja, dan alokasi anggaran agar lebih responsif terhadap kebutuhan aktual serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara optimal.

2.4.2. Alasan Dilakukannya Perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan

Perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan dilakukan untuk memastikan kesesuaian program, kegiatan, target kinerja, dan pagu anggaran dengan kebutuhan pembangunan daerah, kemampuan keuangan daerah, serta prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Proses ini bertujuan meningkatkan kualitas perencanaan, efektivitas pelaksanaan program, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan secara optimal.

2.4.3. Catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD

- Temuan yang paling menonjol meliputi:
 1. Belum optimalnya integrasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.
 2. Kebutuhan penguatan program intensifikasi dan ekstensifikasi PAD untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah.
 3. Perlunya percepatan digitalisasi pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.
 4. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengamanan Barang Milik Daerah (BMD).
 5. Perlunya penguatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan program serta realisasi anggaran.
 6. Penyesuaian pagu anggaran akibat keterbatasan kapasitas fiskal daerah dan kebijakan efisiensi belanja.
 7. Perlunya penajaman indikator kinerja yang mendukung pencapaian target RPJMD dan indikator makro keuangan daerah.
- Catatan penting perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD:
 1. Penyesuaian target PAD sesuai proyeksi potensi riil.
 2. Penambahan fokus kegiatan optimalisasi aset daerah.
 3. Penguatan kegiatan pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah.
 4. Penyesuaian pagu kegiatan berdasarkan hasil forum perangkat daerah dan kemampuan keuangan daerah.
 5. Penajaman indikator kinerja untuk mendukung peningkatan akuntabilitas dan kualitas tata kelola keuangan daerah.

6. Penyesuaian program kegiatan bidang pendapatan pada ranwal RKPD masih ada di BPKAD, namun setelah ditetapkan oleh perda no 5 tahun 2026 tentang penetapan SOTK maka pada Rankhir RKPD tidak ada.

Lampiran tabel berikut, Tabel T-C.31:

TABEL T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027
Kabupaten Probolinggo

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program /Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Tahun (n)	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
	KEUANGAN				525.630.913.642,64	KEUANGAN					553.455.095.980,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Probolinggo	Nilai LHE AKIP PD	83.86	12.200.960.649.64	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Probolinggo	Nilai LHE AKIP PD	83.86	1%	27.245.351.686,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Probolinggo	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Tersusun dan Berkualitas	100 %	29.653.200	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Probolinggo	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Tersusun dan Berkualitas	100 %	100 %	614.495.212,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	16.200.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7	538.195.212,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	8.583.200	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	3	22.700.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	12	4.870.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	12	12	53.600.000,00	

			Kinerja SKPD					Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Probolinggo	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun	100 %	11.646.339.567	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Probolinggo	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun	100 %	100%	17.979.920.111,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	915 org	11.643.793.167	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	915 org	75 org	17.952.920.111,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKP	12		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKP	12	12 laporan	27.000.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Probolinggo	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	4.283.500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Probolinggo	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	100%	1.012.153.104,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	92	2.043.500	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	92	90 org	67.725.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	26	2.240.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	26	24 org	944.428.104,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Probolinggo	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksana	100 %	42.187.400	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Probolinggo	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksana	100 %	100 %	704.005.992,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	13	1.838.900	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	13	17	14.987.400,00	

	Bangunan Kantor		Disediakan			Kantor		Bangunan Kantor yang Disediakan				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	13.570.700	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	17	87.415.800,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	590.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	13	20.332.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	3.173.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	10	43.900.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7	13.617.800	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7	8	123.999.300,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7	3.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7	14	49.200.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37	4.959.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37	114	314.171.492,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	115	1.438.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	115	1	50.000.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Probolinggo	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	100 %	6.185.500	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Probolinggo	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	100 %	100%	2.252.887.250,00	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	3	318.750.000,00	

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan ²	0	3	271.250.000,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	2.680.500	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	2	701.408.000,00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	3.505.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	1	961.479.250,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Probolinggo	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	447.535.482,64	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Probolinggo	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100%	3.682.494.117,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	2.351.700	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	27.752.800,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	10.800.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	11.692.080,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	434.383.782,64	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	8	3.643.049.237,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Probolinggo	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpelihara	100 %	24.776.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Probolinggo	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpelihara	100 %	100%	999.395.900,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22	17.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22	31	574.740.000,00	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	4.576.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	8	98.500.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	2.350.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	14	101.155.900,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1	850.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1	1	225.000.000,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kabupaten Probolinggo	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	92	512.169.743.988	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kabupaten Probolinggo	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	92	0	519.921.588.694,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kabupaten Probolinggo	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan P-APBD	100 %	32.900.000	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kabupaten Probolinggo	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan P-APBD	100 %	100 %	1.169.143.694,00	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	2	216.911.350,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	7.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	2	190.142.144,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	8.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	2	302.407.100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	6.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	2	2	181.408.000,00	

	tentang Penjabaran Perubahan APBD					Penjabaran Perubahan APBD		Perubahan APBD				
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5	7.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5	5	278.275.100,00	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kabupaten Probolinggo	Persentase Realisasi Penyerapan APBD		27.120.000	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kabupaten Probolinggo	Persentase Realisasi Penyerapan APBD	94.1	94.2	945.286.000,00	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12	5.000.000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12	12	96.213.600,00	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	220	1.700.000	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	220	220	16.474.800,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kabupaten Probolinggo	"Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)"	2	9.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kabupaten Probolinggo	"Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran	2	2	92.337.600,00	

								Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)"				
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12	2.130.000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12	12	212.843.000,00	
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	5	1.770.000	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	5	3	176.171.000,00	
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	164	7.520.000	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	164	162	351.246.000,00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kabupaten Probolinggo	Persentase SKPD yang Melaksanakan Rekonsiliasi Akun di LKPD	100 %	13.160.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kabupaten Probolinggo	Persentase SKPD yang Melaksanakan Rekonsiliasi Akun di LKPD	100 %	100%	1.000.694.000,00	
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	2	860.000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	2	2	285.600.000,00	

Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	2	1.900.000	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	2	2	218.029.500,00	
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	6	2.600.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	6	6	225.350.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10	7.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10	10	271.714.500,00	
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kabupaten Probolinggo	Persentase Penyaluran Dana Bantuan Keuangan, Dana Tidak Terduga, Dana Bagi Hasil dan Pembayaran Cicilan	100 %	512.094.563.988	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kabupaten Probolinggo	Persentase Penyaluran Dana Bantuan Keuangan, Dana Tidak Terduga, Dana Bagi Hasil dan Pembayaran Cicilan	100 %	100	516.806.465.000,00	
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	70	483.668.908.988	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	70	325	488.380.810.000,00	
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3	10.000.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3	1	10.000.000.000,00	

	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12	18.425.655.000	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12	1	18.425.655.000,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kabupaten Probolinggo	Indek Pengelolaan Aset Daerah (IPA)	82	699.496.105	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kabupaten Probolinggo	Indek Pengelolaan Aset Daerah (IPA)	82	84	3.005.699.600,00	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Probolinggo	Prosentase SKPD yang tertib pengelolaan BMD yang sesuai peraturan perundangundangan dan tepat waktu	82	699.496.105	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Probolinggo	Prosentase SKPD yang tertib pengelolaan BMD yang sesuai peraturan perundangundangan dan tepat waktu	82	84	3.005.699.600,00	
	Penyusunan Standar Harga	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1	113.000.000	Penyusunan Standar Harga	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1	1	133.000.000,00	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	87	32.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	87	87	32.000.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	87	50.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	87	261	627.038.500,00	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	87	91.000.000	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	87	87	91.000.000,00	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	5	194.285.005	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	500	500	1.453.450.000,00	
	Penilaian Barang Milik Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	5	50.000.000	Penilaian Barang Milik Daerah	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	5	4	500.000.000,00	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan	6	169.211.100	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan	6	6	169.211.100,00	

	Milik Daerah		Barang Milik Daerah			Milik Daerah		Penghapusan Barang Milik Daerah				
--	--------------	--	---------------------	--	--	--------------	--	------------------------------------	--	--	--	--

2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Masyarakat

a) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat adalah proses evaluasi yang dilakukan terhadap proposal atau inisiatif yang diajukan oleh kelompok masyarakat untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan, tujuan pembangunan daerah, serta potensi dampak dan kelayakannya. Proses ini bertujuan untuk memverifikasi bahwa usulan tersebut dapat berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Program/kegiatan/subkegiatan di BPKAD yang mengakomodir usulan masyarakat adalah subkegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota. Subkegiatan ini melekat di BPKAD namun sifatnya hanya sebatas pendelegasian dokumen saja, selanjutnya adalah kewenangan dinas PMD dalam realisasi dan monevnya. Dalam subkegiatan ini menampung Kegiatan POKIR, DD, ADD, BTT dan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota, berikut tabel data penjelasannya;

b) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

Penjelasan Kesesuaian Usulan Program dengan Isu Strategis Tupoksi BPKAD Secara substansi, Program Pengelolaan Keuangan Daerah beserta seluruh kegiatan penunjangnya sangat selaras (inline) dengan isu-isu penting yang dihadapi BPKAD Kabupaten Probolinggo dalam menyelenggarakan tupoksinya selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Berikut adalah pembagian analisis kesesuaian tersebut berdasarkan isu-isu krusial:

1. Isu Penguatan Integritas dan Akuntabilitas Fiskal Daerah

Kondisi Isu:

Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tingkat daerah, tata kelola keuangan penunjang, penyaluran hibah, dan bantuan keuangan dituntut untuk menutup celah risiko secara objektif, transparan, dan bebas dari benturan kepentingan.

Bentuk Kesesuaian:

Penetapan indikator kinerja program berupa "Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah" menjadi instrumen kendali utama BPKAD. Target pencapaian akuntabilitas di 325 desa dan 5 kelurahan membuktikan komitmen tupoksi BPKAD dalam mengawal kepatuhan regulasi secara menyeluruh (totalitas), bukan sekadar formalitas administratif.

2. Isu Optimalisasi dan Ketepatan Waktu Penyaluran Anggaran (Transfer Daerah)

Kondisi Isu:

Kelancaran serapan anggaran di tingkat basis (desa/kelurahan) seringkali terkendala oleh proses birokrasi, keterlambatan pelaporan, dan verifikasi dokumen yang berjenjang.

Bentuk Kesesuaian:

Dimasukkannya subkegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan serta Pengelolaan Dana Bagi Hasil adalah jawaban langsung terhadap tupoksi BPKAD dalam fungsi perbendaharaan dan akuntansi. Indikator berupa "Jumlah Laporan Hasil Analisis" menjamin bahwa penyaluran DD, ADD, POKIR, serta DBH Pajak dan Retribusi didasarkan pada kajian yang matang untuk meminimalisir keterlambatan transfer dana ke kas desa.

3. Isu Manajemen Risiko dan Kesiapsiagaan Fiskal (Emergency Response)

Kondisi Isu:

Kerentanan wilayah terhadap kondisi darurat, bencana, atau kebutuhan mendesak masyarakat memerlukan mekanisme pencairan anggaran yang cepat namun tetap terjaga akuntabilitasnya secara hukum.

Bentuk Kesesuaian:

Subkegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dengan catatan Dana Tidak Terduga (TT) memfasilitasi peran BPKAD dalam memitigasi risiko fiskal daerah. Hal ini memastikan fungsi BPKAD sebagai penjaga stabilitas keuangan daerah dapat berjalan fleksibel saat krisis, namun tetap terdokumentasi rapi melalui "Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat".

4. Isu Penyelarasan Aspirasi Politis (POKIR) dengan Target Pembangunan Daerah

Kondisi Isu:

Adanya tantangan dalam mengintegrasikan Pokok-Pokok Pikiran (POKIR) DPRD ke dalam sistem penganggaran belanja bantuan keuangan daerah agar tetap harmonis dan tidak tumpang tindih (overlapping).

Bentuk Kesesuaian:

Dengan menaruh POKIR secara eksplisit ke dalam ruang lingkup analisis perencanaan dan penyaluran instrumen bantuan keuangan, BPKAD dapat menjalankan fungsi checking and balancing. BPKAD memastikan seluruh usulan aspirasi pemangku kepentingan tersebut terakomodasi secara legal-formal dan selaras dengan kemampuan struktur APBD 2027.

c) **TABEL T-C.32** Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2027 Kabupaten Probolinggo

TABEL T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2027
Kabupaten Probolinggo

NO.	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
	KEUANGAN				
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kabupaten Probolinggo	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	325 Desa 5 Kelurahan	1. DD 2. ADD 3. POKIR 4. TT 5. DBH Pajak 6. DBH Retribusi
	KEGIATAN Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kabupaten Probolinggo	Persentase Penyaluran Dana Bantuan Keuangan, Dana Tidak Terduga, Dana Bagi Hasil	325 Desa 5 Kelurahan	1. DD 2. ADD 3. POKIR 4. TT 5. DBH Pajak 6. DBH Retribusi
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	325 Desa 5 Kelurahan	1. DD 2. ADD 3. POKIR
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kabupaten Probolinggo	1. TT
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kabupaten Probolinggo	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	325 Desa 5 Kelurahan	1. DBH Pajak 2. DBH Retribusi

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Bahwa pembangunan daerah merupakan dasar dalam mendukung tercapainya tujuan nasional. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan di daerah tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan di tingkat nasional maupun provinsi. Adapun Visi pembangunan nasional Indonesia tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yakni mewujudkan "Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan" menuju Indonesia Emas 2045". Visi besar ini dirancang untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan keluar dari *Middle-Income Trap* dengan menitikberatkan pada empat fokus utama:]

- Pembangunan Manusia dan Iptek: Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, produktif, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Ekonomi Berkelanjutan: Mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berbasis transformasi teknologi serta hilirisasi.
- Pemerataan Pembangunan: Menghilangkan disparitas (ketimpangan) antarwilayah melalui penyediaan infrastruktur dasar yang merata.
- Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola: Memperkuat stabilitas politik, supremasi hukum, dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 berfokus pada tiga sasaran utama: penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5–5%, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta pertumbuhan ekonomi menuju 8% pada tahun 2029

❖ **Program Prioritas Nasional (RPJMN 2025–2029)**

Pemerintah menjalankan 17 Program Prioritas yang dijabarkan dari misi *Asta Cita*, dengan beberapa program hasil cepat (*quick wins*) yang meliputi:

- Ketahanan Pangan: Mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan untuk menjamin pilar kesejahteraan petani dan nelayan.
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Meningkatkan pemenuhan gizi untuk menciptakan generasi sehat, cerdas, dan produktif.
- Pembangunan Manusia: Menargetkan peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM) hingga 0,59% melalui reformasi layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas.
- Infrastruktur Dasar: Mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, salah satunya target pencapaian 43% akses air minum aman secara nasional pada tahun 2029

❖ **Arah Pembangunan Provinsi Jawa Timur**

Melalui dokumen perencanaan makro wilayah, RPJMD Jawa Timur mengusung visi "*Bersama Jawa Timur Maju yang Adil, Makmur, Unggul, dan Berkelanjutan*". Fokus strategis di tingkat provinsi meliputi:]

- Jatim Sejahtera & Jatim Kerja: Menekan angka ketimpangan serta memperluas ketersediaan lapangan kerja baru.
- Proyek Strategis Regional: Mendorong optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Gresik dan Singasari, pembangunan jalan tol, bendungan, serta hilirisasi energi.
- Satu Data Indonesia (SDI): Mengintegrasikan tata kelola data antara pusat, daerah, hingga desa untuk efisiensi birokrasi.

❖ **Implementasi Wilayah Kabupaten/Kota Probolinggo**

Pemerintah Daerah Probolinggo mensinkronisasikan RPJMD mereka agar selaras dengan target nasional. Langkah taktis lokal berfokus pada

Tiga Satgas Prioritas Pembangunan: Pemerintah Kabupaten Probolinggo meluncurkan tiga satuan tugas (satgas) khusus sebagai instrumen percepatan untuk mengatasi tantangan pembangunan mendasar secara responsif.

- Infrastruktur Jalan Mantap: Menjadikan perbaikan dan pemeliharaan jalan kabupaten sebagai prioritas utama guna memperlancar logistik komoditas pertanian dan pariwisata.]
- Penyusunan Isu Strategis Lingkungan: Pemerintah Kota Probolinggo mengintegrasikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam arah pembangunan kota jangka menengah untuk mengantisipasi dampak industri perkotaan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Visi RPJMD yang merupakan Visi Kepala Daerah terpilih harus sejalan dengan Visi RPJPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045. Adapun Visi RPJPD Kabupaten Probolinggo adalah "Probolinggo Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan" untuk periode 2025-2045. Sehubungan dengan itu, maka rumusan Visi RPJMD Kabupaten Probolinggo 2025-2029 adalah "Terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang Sejahtera, Amanah-Religius dan Eksis Berdaya Saing" atau yang disingkat "Terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang SAE". Visi ini menjadi landasan pembangunan lima tahun ke depan, yang kemudian dijabarkan melalui misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas. Untuk mendorong tercapainya Visi Pembangunan Kabupaten Probolinggo, maka peran dari BPKAD Kabupaten Probolinggo terletak pada;

Misi 1 (satu) yakni " SAE PEMERINTAHAN, dengan menciptakan tata kelola pemerintahan anti korupsi, kolaboratif dan inovatif". Untuk menjawab tujuan, indikator tujuan dan sasaran yang tertera pada RPJMD, maka setiap PD wajib menjabarkan melalui tujuan dan sasaran PD. Secara rinci tujuan dan sasaran dapat diuraikan pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tujuan	: Meningkatkan Akuntabilitas TataKelola Pemerintah Melalui Peningkatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.
Sasaran	: 1. Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah 2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

TABEL 3.2
 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan/Sasaran BPKAD	Indikator Tujuan /Sasaran BPKAD	Target 2027
Meningkatnya Akuntabilitas TataKelola Pemerintah Melalui Peningkatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.	Indek Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	73 Nilai Indek
Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah	2 %
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	100 %
	Prosentase Pengalokasian Anggaran dalam APBD	80 %
	Prosentase Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %
	Prosentase Penyerapan Anggaran	93 %
	Fleksibilitas Keuangan	2.07 %
	Solvabilitas Operasional	82.1 %
	Persentase Penilaian Opini BPK	100 %
	Solvabilitas Jangka Panjang	51.63 %
	Solvabilitas Layanan	2.330.768.19
	Solvabilitas Jangka Pendek	100 %
	Prosentase Kemandirian Keuangan Daerah	18.35 %

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam merumuskan program dan kegiatan tahun 2027 mengacu pada pencapaian visi misi kepala daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo 2025-2029 yang dirinci dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo 2025-2029. Perumusan program dan kegiatan ini dalam rangka mendukung pencapaian misi Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029. Dalam dokumen RPJMD tersebut

telah dijabarkan indikator dan target capaian tiap tahun yang harus dicapai dengan program dan kegiatan tertentu sebagai berikut:

a) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Perumusan program baru harus mempertimbangkan realisasi target kinerja hasil program (outcomes) dan keluaran kegiatan (output) yang telah dicapai pada periode sebelumnya. Melihat sejauh mana konsistensi pencapaian tahunan terhadap target jangka menengah yang ada di dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penilaian terhadap aspek teknis pelayanan yang menjadi tugas pokok BPKAD, seperti efisiensi penerbitan SP2D, ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran (KUA-PPAS dan RAPBD), serta tingkat ketertiban administrasi aset/Barang Milik Daerah (BMD).

3. Isu-Isu Penting dan Strategis

Pertimbangan terhadap persoalan, masalah, serta hambatan yang sedang dihadapi atau diperkirakan akan terjadi di masa mendatang dalam lingkup pengelolaan keuangan dan aset daerah. Upaya adaptasi terhadap perkembangan tata kelola pemerintahan yang menuntut transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi (good governance).

4. Penyelarasan dengan Dokumen Perencanaan yang Lebih Tinggi (Aspek Kebijakan)

Program dan kegiatan BPKAD tidak berdiri sendiri, melainkan harus selaras dengan ;

- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD): Sebagai pedoman tahunan tingkat daerah.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD): Memastikan program mendukung Misi Kepala Daerah (misalnya fokus pada perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik).
- Telaah Kebijakan Nasional: Menyesuaikan arah pembangunan daerah agar tetap sinkron dengan prioritas dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

5. Regulasi dan Landasan Hukum

Perumusan nomenklatur program, kegiatan, hingga sub-kegiatan wajib berpedoman pada regulasi penataan daerah, salah satunya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, serta aturan pengelolaan keuangan daerah terbaru lainnya.

6. Penelaahan Usulan dan Aspirasi Pemangku Kepentingan

Mempertimbangkan masukan yang masuk melalui Forum Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, maupun pokok-pokok pikiran dari pemangku kepentingan terkait demi efektivitas fungsi penunjang keuangan di daerah.

b) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

- Jumlah program **3**
- jumlah kegiatan **12**
- Jumlah Subkegiatan 51

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
- Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
- Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
- Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

- Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
- Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
- Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

4. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
- Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
- Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota

III. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

- Penyusunan Standar Harga
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- Penatausahaan Barang Milik Daerah
- Inventarisasi Barang Milik Daerah
- Pengamanan Barang Milik Daerah
- Penilaian Barang Milik Daerah
- Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

c) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

Program, Kegiatan dan Subkegiatan BPKAD TA 2027 ada perubahan, dimana urusan bidang pendapatan sudah tidak termuat dalam dokumen perencanaan BPKAD berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2026 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

Tabel rencana program dan kegiatan dan Subkegiatan BPKAD TA 2027 sebagai berikut :

TABEL T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPKAD Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan	Rencana Tahun 2027				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KEUANGAN							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab	83,08 (nilai)	23.228.650.597			23.339.000.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	50.174.000			75.000.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab	6 dokumen	14.634.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak kendaraan bermotor	7 dokumen	26.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 dokumen	21.976.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	3 dokumen	23.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 laporan	13.564.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak kendaraan bermotor	12 laporan	26.000.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	16.717.017.757,12	100 %		23.022.000.000,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	917 orang/bulan	16.697.027.757,12	Pendapatan Asli Daerah (PAD)/dana Alokasi Umum (DAU)	1000 orang/bulan	23.000.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	19.990.000	Pendapatan bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	12 Laporan	22.000.000

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	38.600.000,00		100 %	140.000.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 paket	8.600.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	94 Orang	105.000.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Orang	30.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	28 Orang	35.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	421.868.896,01		100 %	767.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Paket	4.990.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	14 Paket	6.000.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Paket	48.377.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	11 Paket	52.000.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Paket	4.038.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	12 Paket	9.000.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Paket	50.780.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	5 Paket	17.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Paket	84.105.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	10 Paket	120.000.000,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Laporan	20.830.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	6 Paket	17.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Laporan	186.348.896,01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	60.laporan	510.000.000,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120 Dokumen	22.400.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	150 laporan	36.000.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	257.141.000,00			790.000.000,00
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	82.600.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	6 Unit	350.000.000,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	26.615.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	5 unit	110.000.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	133.520.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	15 Unit	210.000.000,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	Kab Probolinggo,	2 Unit	14.406.000,00	Pendapatan Bagi Hasil	1 Unit	120.000.000,00

	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Pajak Rokok		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	172.544.344,00			825.000.000,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	11.300.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	12 Laporan	12.000.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12.591.264,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	13 Laporan	13.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	148.653.080,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	30 Laporan	800.000.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpelihara	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	472.926.002,92			825.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23 Unit	316.458.002,92	Dana Alokasi Umum (DAU)	24 Unit	395.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Unit	88.000.000,00	Pendapatan bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	13 Unit	160.000.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Unit	57.044.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	10 Unit	110.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	11.424.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2 Unit	160.000.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	504.438.708.480,00			507.561.999.840,00
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan P-APBD)	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	750.000.000,00			1.520.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	152.708.000,00	PAD, SILPA, DAU	2 Dokumen	860.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	143.645.300,00	DAU	2 Dokumen	160.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	169.358.400,00	PAD	2 Dokumen	160.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan,	2 Dokumen	155.236.400,00	SILPA	2 Dokumen	224.000.000,00

	Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Semua Kel/Desa					
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	129.051.900,00	PAD/Pajak Rokok	5 Dokumen	116.000.000,00
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Realisasi Penyerapan Belanja APBD	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.4 %	400.000.000,00		94.5 %	542.000.000,00
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	54.455.200,00	PAD/DAU/DBH /DBH Pajak Rokok	12 Dokumen	60.000.000,00
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220 Dokumen	20.050.200,00	DAU/DBH /DBH Pajak Rokok	220 Dokumen	25.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	37.851.900,00	PAD/DAU/DBH /DBH Pajak Rokok	2 Laporan	45.000.000,00
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	250.413.300,00	PAD/DAU	12 Dokumen	338.000.000,00
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	15.680.000,00	PAD/DAU/DBH /DBH Pajak Rokok	6 Dokumen	36.000.000,00
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162 Orang	21.050.000,00	PAD/DAU/DBH /DBH Pajak Rokok	162 Orang	38.000.000,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase SKPD yang melaksanakan Rekonsiliasi Akun di LKPD	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	500.000.000,00			499.999.840,00
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87 Dokumen	103.527.340,00	PBBKB/Pendapatan bagi hasil pajak rokok	87 Dokumen	103.527.340,00
	Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban	Kab Probolinggo,	2 Laporan	64.995.000,00	PBBKB/Pendapatan bagi	2 Laporan	64.995.000,00

	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			hasil pajak rokok		
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Laporan	111.765.660,00	PBBKB/DAU/Pendapatan bagi hasil pajak rokok	6 Laporan	111.765.500,00
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	219.712.000,00	PAD/DAU	10 Dokumen	219.712.000,00
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyaluran Dana Bantuan Keuangan, Dana Tidak Terduga dan Dana Bagi Hasil	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	502.788.708.480,00		100%	505.000.000.000,00
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71 Laporan	439.852.947.677,00	PAD/DAU/Dana Desa	71 Laporan	447.000.000.000,00
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	17.500.000.000,00	DAU	12 Laporan	13.000.000.000,00
	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	45.435.760.803,00	PAD/DBH pajak kendaraan bermotor	12 Laporan	45.000.000.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indek Pengelolaan Aset Daerah (IPA)	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84 Indek	1.779.347.024,59		83 indik	1.748.000.000,00
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase SKPD yang tertib pengelolaan BMD yang sesuai peraturan perundangundangan dan tepat waktu	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84%	1.779.347.024,59		83 %	1.748.000.000,00
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 dok	109.979.200,00	SILPA/bagi hasil pajak kendaraan bermotor	1 Dokumen	110.000.000,00
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87 dok	8.038.000,00	DAU	87 Dokumen	15.000.000,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87 laporan	359.174.000,00	DAU	87 Dokumen	280.000.000,00
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87 laporan	32.788.000,00	DAU	87 Dokumen	17.000.000,00

	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 laporan	779.347.024,59	Silpa/DAU/bagi hasil pajak rokok	7 Laporan	740.000.000,00
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 laporan	350.000.000,00	PAD	7 Laporan	560.000.000,00
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 laporan	140.020.800,00	Silpa	6 Dokumen	26.000.000,00

❖ **Ringkasan Narasi Rencana Kerja dan Anggaran BPKAD Kabupaten Probolinggo**

Dokumen perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Probolinggo menetapkan arah kebijakan, target kinerja, dan alokasi pendanaan di seluruh wilayah kabupaten untuk periode 2027 hingga perkiraan maju tahun 2028. Secara keseluruhan, strategi program kerja diwadahi ke dalam 3 (tiga) program utama dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan internal organisasi, administrasi, dan peningkatan akuntabilitas internal dengan target Nilai LHE AKIP sebesar 83,08. Alokasi Anggaran: Direncanakan sebesar Rp23,22 miliar pada tahun 2027 dan diperkirakan naik tipis menjadi Rp23,33 miliar pada tahun 2028.

Fokus Kegiatan:

Porsi anggaran terbesar digunakan untuk Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Rp21,43 miliar) yang mencakup pemenuhan gaji dan tunjangan bagi 917 hingga 1.000 ASN per bulan. Kegiatan lainnya meliputi perencanaan kinerja, pengadaan pakaian dinas, penyediaan logistik/alat kantor, rapat koordinasi, pengadaan kendaraan dinas (jabatan & operasional), serta jasa pemeliharaan rutin aset kantor. Sumber dana program ini didominasi oleh PAD, DAU, serta Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini merupakan pilar utama dengan pagu anggaran terbesar yang memayungi akuntabilitas tata kelola keuangan makro daerah dengan target capaian akuntabilitas 100%.

- Alokasi Anggaran: Membutuhkan dana sebesar Rp501,59 miliar pada tahun 2027 dan diperkirakan meningkat menjadi Rp507,56 miliar pada tahun 2028. Fokus Kegiatan: Penyusunan Anggaran (Rp750 juta): Penyusunan dokumen KUA-PPAS, APBD, dan regulasi kebijakan anggaran.
- Perbendaharaan & Perbankan (Rp400 juta): Rekonsiliasi kas, penerbitan SPD, penatausahaan kas, dan pembinaan keuangan daerah dengan target realisasi penyerapan belanja APBD sebesar 94,4%–94,5%.
- Akuntansi dan Pelaporan (Rp500 juta): Rekonsiliasi LKPD, konsolidasi laporan keuangan SKPD/BLUD, dan penyusunan Perda pertanggungjawaban APBD.
- Penunjang Urusan Pengelolaan Keuangan (Rp499,94 miliar): Sub-kegiatan dengan alokasi paling masif, meliputi penyaluran Bantuan Keuangan (Rp446,50 miliar untuk 71 laporan), Pengelolaan Dana Darurat/Mendesak (Rp12,50 miliar), dan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten (Rp40,94 miliar).

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

Program ini mengarah pada penguatan manajemen aset daerah demi mencapai target Indeks Pengelolaan Aset Daerah (IPA) sebesar 83 serta memastikan 83% SKPD tertib mengelola aset secara tepat waktu. Alokasi Anggaran: Membutuhkan total pagu indikatif sebesar Rp1,90 miliar (2027) dan diperkirakan terkoreksi menjadi Rp1,74 miliar (2028).

Fokus Kegiatan: Mencakup penyusunan standar harga, perencanaan kebutuhan (87 dokumen), penatausahaan (87 dokumen), inventarisasi (87 dokumen), pengamanan BMD (6 laporan dengan anggaran Rp800 juta), penilaian BMD (Rp450 juta), serta optimalisasi penggunaan/penghapusan aset (Rp140 juta). Pendanaan disokong oleh DAU, PAD, SiLPA, dan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor.

Kesimpulan:

Rencana kerja BPKAD Kabupaten Probolinggo untuk tahun 2027 menunjukkan komitmen yang kuat pada efisiensi birokrasi internal (belanja penunjang), penyaluran bantuan keuangan daerah berskala besar yang tepat sasaran, penertiban tata kelola aset daerah (BMD).

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Renja BPKAD Tahun 2027 merupakan dokumen yang menjadi acuan BPKAD dalam melaksanakan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. RENJA berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif. Program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2027 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan	Rencana Tahun 2027			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KEUANGAN					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab	83,08 (nilai)	23.228.650.597	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	50.174.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab	6 dokumen	14.634.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak kendaraan bermotor
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 dokumen	21.976.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 laporan	13.564.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak kendaraan bermotor
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	16.717.017.757,12	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	917 orang/bulan	16.697.027.757,12	Pendapatan Asli Daerah (PAD)/dana Alokasi Umum (DAU)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	19.990.000	Pendapatan bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	38.600.000,00	

	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 paket	8.600.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)/dana Alokasi Umum (DAU)
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Orang	30.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)/dana Alokasi Umum (DAU)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	421.868.896,01	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Paket	4.990.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Paket	48.377.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Paket	4.038.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Paket	50.780.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Paket	84.105.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Laporan	20.830.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Laporan	186.348.896,01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120 Dokumen	22.400.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	257.141.000,00	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	82.600.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	26.615.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	133.520.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	14.406.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	172.544.344,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	11.300.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12.591.264,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	148.653.080,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpelihara	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	472.926.002,92	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23 Unit	316.458.002,92	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Unit	88.000.000,00	Pendapatan bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Unit	57.044.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	11.424.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	504.438.708.480,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan P-APBD)	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	750.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	152.708.000,00	PAD, SILPA, DAU
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	143.645.300,00	DAU

	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	169.358.400,00	PAD
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	155.236.400,00	SILPA
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	129.051.900,00	PAD/Pajak Rokok
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Realisasi Penyerapan Belanja APBD	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.4 %	400.000.000,00	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	54.455.200,00	PAD/DAU/DBH /DBH Pajak Rokok
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220 Dokumen	20.050.200,00	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	37.851.900,00	PAD/DAU/DBH /DBH Pajak Rokok
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemetongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemetongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	250.413.300,00	PAD/DAU
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	15.680.000,00	PAD/DAU/DBH /DBH Pajak Rokok

	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162 Orang	21.050.000,00	PAD/DAU/DBH /DBH Pajak Rokok
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase SKPD yang melaksanakan Rekonsiliasi Akun di LKPD	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	500.000.000,00	
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87 Dokumen	103.527.340,00	PBBKB/Pendapatan bagi hasil pajak rokok
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	64.995.000,00	PBBKB/Pendapatan bagi hasil pajak rokok
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Laporan	111.765.660,00	PBBKB/DAU/Pendapatan bagi hasil pajak rokok
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	219.712.000,00	PAD/DAU
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyaluran Dana Bantuan Keuangan, Dana Tidak Terduga dan Dana Bagi Hasil	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	502.788.708.480,00	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71 Laporan	439.852.947.677,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Desa
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	17.500.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)
	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	45.435.760.803,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indek Pengelolaan Aset Daerah (IPA)	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84 Indek	1.779.347.024,59	

	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase SKPD yang tertib pengelolaan BMD yang sesuai peraturan perundangundangan dan tepat waktu	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84%	1.779.347.024,59	
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 dok	109.979.200,00	SILPA/bagi hasil pajak kendaraan bermotor
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87 dok	8.038.000,00	DAU
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87 laporan	359.174.000,00	DAU
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87 laporan	32.788.000,00	DAU
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 laporan	779.347.024,59	Silpa/DAU/bagi hasil pajak rokok
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 laporan	350.000.000,00	PAD
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 laporan	140.020.800,00	Silpa

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Probolinggo menetapkan 3 (tiga) program utama untuk tahun anggaran 2027 yang mencakup fungsi internal penunjang hingga fungsi pelayanan publik yang berdampak luas.

Berikut adalah rincian narasi dari masing-masing program tersebut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini difokuskan pada penguatan internal organisasi, administrasi keuangan, kepegawaian, sarana prasarana, serta pemeliharaan aset kantor dengan total pagu indikatif sebesar 18.130.272.000,05. Target capaian Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah dipatok pada angka 83,08, dengan kegiatan sebagai berikut;

- Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Rp. 50.174.000,00
- Administrasi Keuangan Internal: Menyerap anggaran terbesar pada program ini, yaitu Rp 16.717.017.757,12, di mana mayoritas dialokasikan untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN (mencakup 917 orang/bulan).
- Administrasi kepegawaian perangkat daerah sebesar Rp. 38.600.000,00
- Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 421.868.896,01
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 257.141.000,00
- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar Rp.172.544.344,00
- Pemeliharaan Aset: Untuk menjaga kelayakan fungsi aset kantor, dianggarkan dana sebesar Rp666 juta, yang didominasi oleh biaya pemeliharaan kendaraan perorangan dinas sebesar Rp 472.926.002,92 juta dengan sumber dana dari Dana Alokasi Umum (DAU).

II. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program strategis ini memegang anggaran paling masif, yakni sebesar Rp 504.438.708.480,00 dengan target tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah mencapai 100%.

- Koordinasi Anggaran & Perbendaharaan: Proses penyusunan APBD/P-APBD dianggarkan sebesar Rp750 juta, koordinasi perbendaharaan daerah sebesar Rp400 juta, dan akuntansi pelaporan sebesar Rp500 juta.
- Penunjang Urusan Kewenangan (Porsi Terbesar): Sebesar Rp 502.788.708.480,00 atau hampir 99% dari total anggaran program ini dialokasikan untuk penyaluran dana bantuan keuangan, dana tidak terduga, dan dana bagi hasil. Komponen terbesarnya adalah Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan sebesar Rp 439.852.947.677,00 , disusul oleh Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak sebesar Rp17,5 miliar dan Dana bagi hasil sebesar Rp. 45.435.760.803,00

III. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola aset daerah dengan target capaian Indeks Pengelolaan Aset Daerah (IPA) di angka 83 dan tingkat ketertiban SKPD sebesar 83%. Total pagu yang dianggarkan adalah sebesar Rp 1.779.347.024,59

- Porsi anggaran terbesar dialokasikan untuk pelaksanaan Pengamanan Barang Milik Daerah senilai Rp 779.347.024,59 dan Penatausahaan BMD senilai Rp 359.174.000,00. Sisa anggaran didistribusikan untuk penilaian BMD sebesar 350.000.000,00, optimalisasi penggunaan/penghapusan aset (Rp140 juta), serta penyusunan standar harga dan perencanaan kebutuhan.

TABEL 4.2
Rencana Kerja dan Pendanaan Program Prioritas 2027 (Program SAE)

PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN PROBOLINGGO	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	2025		2026		2027	
		Realisasi Kinerja (K)	Realisasi Anggaran (RP)	Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)	Target Kinerja (K)	Target Anggaran (RP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	KEUANGAN						
SAE-GUS-TUR 2. Insentif Tambahan 100 Jutatiap Desa Untuk Infrastruktur Jalan	Program pengelolaan keuangan daerah	100 %	504.149.428.564,00	92 %	477.656.944.820,00	94%	504.438.708.480,00
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	501.972.024.334,00	100 %	475.913.934.800,00	100%	502.788.708.480,00
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	325 laporan	473.416.628.000,00	70 laporan	422.533.638.800,00	71 laporan	439.852.947.677,00
SAE – PENDAPATAN 2. Holding (perusahaan induk) bumd tembakau, agro, perikanan dan sektor unggulan lainnya	Program pengelolaan barang milik daerah	84%	2.622.847.226,00	82%	1.742.691.800,00	84%	1.779.347.024,59
	Pengelolaan barang milik daerah	84%	2.622.847.226,00	82%	1.742.691.800,00	84%	1.779.347.024,59
	Penyusunan standar harga	1 dok	121.454.493,00	1 dok	107.001.400,00	1 dok	109.979.200,00
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	87 dok	20.423.500,00	87 dok	3.322.800,00	87 dok	8.038.000,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	261 laporan	552.764.040,00	261 laporan	279.907.000,00	87 laporan	359.174.000,00
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	87 laporan	74.381.000,00	87 laporan	15.538.000,00	87	32.788.000,00

						laporan	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	123 laporan	1.072.686.423,00	7 laporan	734.039.000,00	8 laporan	779.347.024,59
	Penilaian Barang Milik Daerah	4 laporan	651.743.110,00	4 laporan	582.133.600,00	6 laporan	350.000.000,00
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	6 dokumen	129.394.660,00	5 dokumen	20.750.000,00	6 laporan	140.020.800,00
SAE. PENDAPATAN DAERAH 1. Intensifikasi Dan Ekstensifikasi PAD	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.51 %	2.696.163.911,00	1.4%	2.714.006.300,00	-	-
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.51 %	2.696.163.911,00	1.4%	1.742.691.800,00	-	-
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	15 unit	511.263.440,00	13 unit	360.006.300,00	-	-
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	503 laporan	245.216.123,00	504 laaporan	43.000.000,00	-	-
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	52 objek pajak	338.723.490,00	75 objek pajak	275.000.000,00	-	-
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	5.000 dokumen	185.016.160,00	5.003 dokumen	460.000.000,00	-	-

	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 layanan	397.269.705,00	13 layanan	500.000.000,00	-	-
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	5.000 dokumen	58.987.200,00	100 dokumen	50.000.000,00	-	-
	Penagihan Pajak Daerah	102 dokumen	784.079.163,00	5.003 dokumen	893.000.000,00	-	-
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	47 laporan	175.608.630,00	6 laporan	133.000.000,00	-	-

4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Program Prioritas 2027 (Program SAE)

Dokumen perencanaan BPKAD Kabupaten Probolinggo untuk Tahun Anggaran 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028 berfokus pada pembiayaan program-program strategis daerah di seluruh wilayah kecamatan dan kelurahan/desa. Program prioritas ini terbagi ke dalam tiga pilar utama belanja dan pengelolaan keuangan daerah:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah (Prioritas: SAE-GUS-TUR)

Program ini mengedepankan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah dengan target capaian kinerja 100%. Fokus Kegiatan: Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan, yang salah satunya diarahkan untuk mendukung Insentif Tambahan Rp100 Juta tiap desa untuk infrastruktur jalan (dengan target 71 Laporan). Alokasi Anggaran: Kebutuhan dana untuk program ini direncanakan sebesar Rp501,59 miliar pada tahun 2027, dan diperkirakan sedikit meningkat menjadi Rp507,56 miliar pada tahun 2028. Sumber pendanaan utamanya berasal dari PAD, DAU, dan Dana Desa.

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (Prioritas: SAE – Pendapatan)

Program ini difokuskan pada penguatan aspek legalitas, tata kelola, dan optimalisasi aset daerah guna mendukung pembentukan Holding BUMD di sektor tembakau, agro, perikanan, dan sektor unggulan lainnya. Target Indeks Pengelolaan Aset Daerah (IPA) serta tertib pengelolaan BMD dipatok pada angka 83 (Indeks/Persentase). Fokus Kegiatan: Mencakup penyusunan standar harga, perencanaan kebutuhan (87 dokumen), penatausahaan (87 dokumen), inventarisasi, pengamanan aset (6 laporan), penilaian aset (6 laporan), hingga optimalisasi pemanfaatan/penghapusan BMD (6 dokumen). Alokasi Anggaran: Total pagu indikatif kumulatif untuk berbagai sub-kegiatan pengelolaan aset ini mencapai kisaran Rp3,80 miliar pada tahun 2027 dan diperkirakan terkoreksi menjadi sekitar Rp3,54 miliar pada tahun 2028. Sumber dana yang digunakan bervariasi mulai dari DAU, PAD, SiLPA, hingga Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor/Rokok.

3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (Prioritas: SAE – Pendapatan Daerah)

Program ini berfokus pada Intensifikasi dan Ekstensi PAD guna mendorong kemandirian fiskal daerah. Target Kinerja: BPKAD menargetkan Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Tahun Berjalan masing-masing tumbuh konsisten sebesar 1,5% baik di tahun 2025.. Fokus Kegiatan: Meliputi penyediaan sarana prasarana pajak, pemeliharaan basis data pajak, penilaian PBB-P2 dan BPHTB (penyesuaian NJOP), penetapan wajib pajak, pelayanan konsultasi, verifikasi pelaporan, penagihan, hingga pembinaan/pengawasan retribusi daerah. **(Catatan:** Nilai pagu anggaran spesifik untuk rincian kegiatan ini tidak dicantumkan di tabel

ini, karena pada Tahun Anggaran 2027 bidang pendapatan sudah berubah menjadi OPD BAPENDA).

Kesimpulan:

Secara keseluruhan, arah kebijakan BPKAD Kabupaten Probolinggo untuk tahun 2027 berpusat pada penguatan infrastruktur desa (melalui insentif jalan), modernisasi pengelolaan aset daerah untuk mendukung program **SAE- PENDAPATAN DAERAH** dari unsur BUMD Holding yaitu pemanfaatan dan pengelolaan aset milik daerah. Serta **SAE- PENDAPATAN DAERAH** dari unsur peningkatan pendapatan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi PAD. Namun bidang pendapatan pada Tahun Anggaran 2027 sudah menjadi Bapenda (SOTK baru).

BAB V

PENUTUP

a) Hal hal yang perlu diperhatikan

RENJA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat arah kebijakan, program, kegiatan, serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan. Dokumen ini merupakan penjabaran dari rencana strategis perangkat daerah serta berpedoman pada arah kebijakan pembangunan daerah, guna memastikan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran.

b) Kaidah kaidah Pelaksanaan

Penyusunan RENJA BPKAD telah memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun sebelumnya, isu strategis yang dihadapi, serta kebutuhan riil dalam mendukung peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah. Selain itu, dokumen ini juga diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan.

c) Rencana Tindak Lanjut

Keberhasilan pelaksanaan Renja BPKAD sangat bergantung pada komitmen seluruh pemangku kepentingan, baik internal perangkat daerah maupun sinergi dengan perangkat daerah lainnya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.

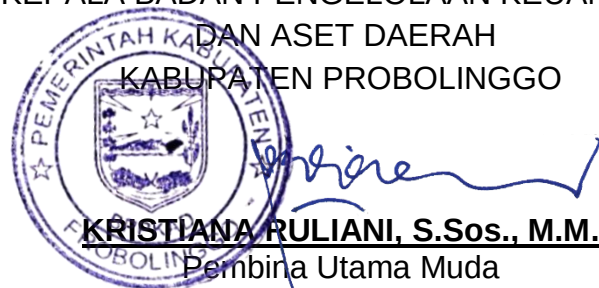
Program dan kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah- langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku.
2. Peningkatan pemahaman dan komitmen seluruh aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo terhadap perencanaan dan pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 dengan efektif dan efisien;
3. Adanya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks dengan upaya melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur baik melalui luring maupun daring;
4. Dalam menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo, maka seluruh aparatur secara berjenjang, bertanggung jawab

dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027.

Rencana Kerja (Renja) ini selanjutnya akan menjadi bahan penyempurnaan dalam proses perencanaan berikutnya, melalui forum perangkat daerah dan mekanisme perencanaan lainnya. Diharapkan melalui perencanaan yang lebih terarah, terukur, dan akuntabel, BPKAD dapat terus meningkatkan kinerja dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, efektif, dan akuntabel.

PROBOLINGGO, 05 Agustus 2026
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO



KRISTIANA RULIANI, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730215 199302 2 002